

## **IMPLEMENTASI MODEL LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL SISWA: ANALISIS EFEKTIVITAS DUKUNGAN SISTEM BERBASIS MODEL EDWARDS III**

Rosemila Amalia<sup>1</sup>, Sri Mustika<sup>2</sup>, Dinny Mardiana<sup>3</sup>, Suharyanto H. Soro<sup>4</sup>  
Universitas Islam Nusantara,  
[rosemilaamalia69@gmail.com](mailto:rosemilaamalia69@gmail.com)<sup>1</sup>, [srimumstikakuliah@gmail.com](mailto:srimumstikakuliah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mardianadinny1@gmail.com](mailto:mardianadinny1@gmail.com)<sup>3</sup>, [suharyantosoro@gmail.com](mailto:suharyantosoro@gmail.com)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*Adolescent mental health is currently in an alarming condition; national data indicate that approximately one in three Indonesian adolescents (34.9%) experience mental health problems, with significant increases in anxiety and depression cases in the post-pandemic period. This study aims to analyze the implementation of the Guidance and Counseling (GC) model at SMPN 43 Bandung using Edwards III Policy Implementation Model as the analytical framework. This research employed a qualitative case study approach with data collected through in-depth interviews and observations. The findings reveal that communication through In-House Training (IHT) ensures shared understanding and alignment between school leaders and implementers, while adequate budgeting and well-facilitated counseling rooms serve as key determinants of success, distinguishing this school from previous studies. The autonomous bureaucratic structure and formal collaboration through the TPPK Team, ESQ Training, Character Building initiatives, and the Homeroom Teacher Program establish an efficient referral system. Furthermore, the empathetic attitude of GC practitioners successfully eliminates the stigma commonly attached to counseling services, leading to a significant increase in students' help-seeking behavior. However, the study also identifies gaps in the technical competence of GC teachers, particularly the need for enhanced mastery of advanced clinical counseling techniques. The study concludes that the implementation of GC services at SMPN 43 Bandung is highly effective due to the integration of strong managerial commitment and robust systemic support. This success demonstrates that eliminating instrumental barriers directly contributes to creating a healthy and stigma-free school climate. The model has strong potential to serve as a best practice reference for other educational institutions in managing adolescent mental health.*

**Keywords:** *Implementation Model, Guidance and Counseling, Mental Health, Edwards III Model.*

### **ABSTRAK**

Isu kesehatan mental remaja saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan; data nasional menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 3 remaja Indonesia (34,9%) memiliki masalah kesehatan mental, dengan peningkatan kasus kecemasan dan

depresi yang signifikan pascapandemi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi model Bimbingan dan Konseling (BK) di SMPN 43 Bandung melalui kerangka Model Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi melalui *In-House Training* (IHT) menjamin kesamaan visi antara pimpinan dan pelaksana, sementara dukungan anggaran dan fasilitas konseling yang mewah menjadi faktor kunci keberhasilan yang membedakan sekolah ini dari temuan riset terdahulu. Struktur birokrasi yang otonom dan kolaborasi formal melalui Tim TPPK, *ESQ Training*, *Character Building* serta Program Guru Wali menciptakan sistem rujukan yang efisien. Selain itu, sikap pelaksana yang empati berhasil meniadakan stigma negatif terhadap BK, sehingga meningkatkan perilaku mencari bantuan (*help-seeking behavior*) siswa secara signifikan. Namun, ditemukan celah pada aspek kompetensi teknis Guru BK yang masih memerlukan penguasaan teknik konseling klinis lanjutan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi layanan BK di SMPN 43 Bandung sangat efektif sebagai hasil dari integrasi komitmen manajerial dan dukungan sistem yang solid. Keberhasilan ini membuktikan bahwa penghapusan hambatan instrumental secara langsung berkontribusi pada terciptanya iklim sekolah yang sehat dan bebas stigma. Model ini berpotensi menjadi praktik baik (*best practice*) bagi institusi pendidikan lainnya dalam mengelola kesehatan mental remaja.

**Kata Kunci:** Implementasi Model, Bimbingan dan Konseling, Kesehatan Mental, Model Edwards III.

## **A. Pendahuluan**

Kesehatan mental remaja merupakan fondasi krusial bagi keberhasilan akademik dan perkembangan pribadi siswa. Secara teoretis, masa remaja adalah periode kritis yang ditandai dengan perubahan neurobiologis dan psikososial yang pesat, sehingga rentan terhadap gangguan emosional jika tidak didukung oleh sistem lingkungan yang stabil. Urgensi penanganan kesehatan mental ini telah diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan paripurna di lingkungan sekolah. Secara lebih spesifik, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek)

Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), memberikan mandat formal kepada layanan Bimbingan dan Konseling (BK) untuk menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan psikis (*well-being*) siswa.

Kegagalan dalam pemenuhan kesehatan mental remaja memiliki dampak sistemik yang merugikan. Fakta nasional dari *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS, 2022) menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Dampak dari kondisi mental yang tidak sehat mencakup penurunan motivasi belajar secara drastis, peningkatan risiko perilaku berisiko, hingga isolasi sosial

yang mengganggu proses sosialisasi di sekolah (Silitonga, 2024). Sebaliknya, remaja dengan mental yang sehat dicirikan oleh kemampuan untuk mengelola stres harian, produktif dalam belajar, serta memiliki resiliensi dalam menghadapi tekanan sosial (WHO, 2022). Menurut teori psikologi perkembangan, ciri mental sehat pada remaja juga mencakup adanya efikasi diri dan kemampuan menjalin relasi interpersonal yang harmonis tanpa rasa cemas yang berlebihan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) muncul ketika sebagian besar studi literatur hanya berfokus pada identifikasi hambatan dan kegagalan sistem. Masih sangat minim penelitian yang secara komprehensif menganalisis kasus praktik terbaik (*best practice*) di mana dukungan pimpinan dan ketersediaan sumber daya justru menjadi faktor pemungkin (*enabler*) yang berhasil. Fenomena di SMPN 43 Bandung menawarkan kondisi nyata yang kontras dengan temuan-temuan hambatan tersebut. Di sekolah ini, ditemukan fakta lapangan berupa komitmen manajerial yang tinggi yang termanifestasi dalam penyediaan fasilitas konseling mewah, anggaran yang terjamin, serta pembentukan ekosistem kolaborasi melalui Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk menguji bagaimana keberhasilan dukungan sistem secara holistik memengaruhi proses layanan dan menciptakan *environmental input* yang positif serta bebas stigma. Meskipun urgensi dan ciri ideal telah terpetakan, implementasi layanan kesehatan mental di sekolah sering kali menemui jalan buntu. Penelitian terdahulu oleh Wulan dan Yuni (2023) melaporkan bahwa minimnya

dukungan manajerial sering menjadi penghambat utama layanan BK. Dalam simpulan penelitiannya, Mustofa dan Wahid (2021) secara eksplisit memberikan saran agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi model sekolah yang berhasil meniadakan stigma negatif melalui penguatan dukungan sistem. Saran ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis praktik terbaik (*best practice*) di SMPN 43 Bandung, yang secara empiris telah berhasil menyediakan fasilitas konseling representatif dan dukungan anggaran yang stabil.

Guna membedah keberhasilan tersebut secara ilmiah, penelitian ini menggunakan kerangka analitis Model Implementasi George C. Edwards III (1980). Edwards III mengidentifikasi empat variabel kritis penentu keberhasilan kebijakan, yakni: Komunikasi (kejelasan perintah), Sumber Daya (manusia, fasilitas, dan anggaran), Disposisi (sikap pelaksana), dan Struktur Birokrasi (Standard Operating Procedure dan fragmentasi). Model ini sangat relevan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel tersebut bekerja sinergis dalam mendukung operasionalisasi layanan BK. Hubungan model ini dengan penelitian terletak pada kemampuannya untuk mengonfirmasi apakah dukungan pimpinan yang kuat di SMPN 43 Bandung telah memenuhi kriteria komunikasi dan sumber daya yang ideal sehingga menghasilkan *outcome* layanan yang efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis peran variabel komunikasi dan sumber daya dalam mendukung *instrumental input* kebijakan BK; (2) Menganalisis

efektivitas variabel struktur birokrasi dan sikap pelaksana dalam menciptakan *environmental input* yang kondusif; serta (3) Menilai *outcome* layanan dan persepsi siswa terhadap aksesibilitas dukungan kesehatan mental di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan standar bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan sistem pendukung kesehatan mental yang berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatori untuk membedah mekanisme implementasi Bimbingan dan Konseling di SMPN 43 Bandung. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi proses sosial dan interaksi manusia di balik data administratif, sesuai dengan fokus penelitian pada variabel model George C. Edwards III. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas dukungan sistem kesehatan mental di sekolah.

Lokasi penelitian di SMPN 43 Bandung dipilih secara sengaja (*purposive*) karena sekolah ini menunjukkan anomali positif dalam hal dukungan anggaran dan fasilitas dibandingkan dengan temuan pada penelitian-penelitian terdahulu. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas: (1) Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan strategis; (2) Guru Bimbingan dan Konseling sebagai pelaksana teknis utama; (3) Wali Kelas sebagai elemen pendukung kolaboratif; serta (4) Siswa sebagai subjek penerima layanan. Diversitas informan ini bertujuan untuk

menjamin validitas data melalui perspektif multi-level, mulai dari tingkat manajerial hingga akar rumput. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur yang dikembangkan dari empat variabel utama Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Observasi difokuskan pada sarana fisik ruang konseling, media informasi bimbingan, dan pelaksanaan pembiasaan *Character Building*, serta interaksi guru dan siswa dalam lingkungan sekolah. Selain itu, angket persepsi siswa disebarkan untuk mengukur *outcome* layanan dan tingkat stigma. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tahap kondensasi data, penyajian data dalam bentuk naratif analitis, serta penarikan kesimpulan yang divalidasi melalui uji kredibilitas dan dependabilitas.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian pada Kamis, 11 Desember 2025 di SMPN 43 Bandung menunjukkan bahwa implementasi model Bimbingan dan Konseling telah mencapai tahap sangat efektif melalui sinergi empat variabel utama. Pertama, optimalisasi *instrumental input* melalui komunikasi dan sumber daya menjadi pilar utama keberhasilan. Komunikasi kebijakan dari Kepala Sekolah kepada Guru Bimbingan dan Konseling berlangsung secara jelas dan konsisten, terutama melalui mekanisme *In-House Training* (IHT). Hal ini selaras dengan teori Edwards III (1980) yang menyatakan bahwa

transmisi informasi yang akurat dan konsisten merupakan prasyarat kepatuhan pelaksana. Temuan ini secara signifikan membedah hambatan *top-down communication* yang sering menjadi kendala di sekolah lain sebagaimana dilaporkan oleh Silitonga (2024). Kekuatan komunikasi ini didukung oleh ketersediaan sumber daya yang luar biasa; ketiadaan hambatan anggaran dan penyediaan fasilitas mewah (ruang privat dengan ventilasi alami, sofa, dan *smart board*) mengubah persepsi layanan Bimbingan dan Konseling dari sekadar pelengkap menjadi unit strategis sekolah.

Kedua, efektivitas struktur birokrasi dan kolaborasi di sekolah ini terbukti memfasilitasi, bukan menghambat pelayanan. Berbeda dengan temuan Mustofa dan Wahid (2021) mengenai struktur birokrasi yang kaku dan sentralistik, SMPN 43 Bandung memberikan otonomi dan wewenang penuh kepada Guru Bimbingan dan Konseling dalam berupaya meningkatkan kesehatan mental. Struktur ini diperkuat dengan pelaksanaan pembiasaan *Character Building* dan kolaborasi dengan guru PAI dalam melaksanakan pembiasaan ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*), dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Program Guru Wali. Sesuai dengan gagasan Syafar dan Wahab (2020), kolaborasi lintas unit ini memastikan alur rujukan (*referral system*) bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan mental berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit.

Ketiga, ketercapaian *outcome* dan *environmental input* dalam mengatasi isu stigma merupakan temuan paling krusial. Sikap pelaksana (*disposition*) yang ditunjukkan melalui empati tinggi dan responsivitas wali kelas

menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Data angket persepsi siswa mengonfirmasi keberhasilan dalam menihilkan stigma negatif terhadap ruang Bimbingan dan Konseling. Kondisi bebas stigma ini merupakan indikator kunci keberhasilan *environmental input*, di mana siswa merasa nyaman mencari bantuan (*help-seeking behavior*) tanpa takut dilabeli sebagai siswa bermasalah. Keberhasilan ini memperkuat temuan Fitriyana dkk. (2021) bahwa efektivitas layanan sangat ditentukan oleh sejauh mana siswa merasakan manfaat praktis dari intervensi yang diberikan.

Terakhir, meskipun dukungan infrastruktur dan sistem sangat kuat, penelitian ini mengidentifikasi adanya tantangan kompetensi (*gaps in resources*) pada aspek sumber daya manusia. Terdapat kesenjangan antara kompleksitas kasus psikologis siswa dengan penguasaan teknik konseling lanjutan seperti *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT). Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan *outcome* positif secara jangka panjang, dukungan *instrumental input* sekolah harus mulai bertransformasi dari fokus pada *hardware* (fasilitas dan anggaran) menuju penguatan *skillware* (kompetensi klinis konselor). Dengan demikian, keberhasilan dukungan sistem yang telah ada saat ini perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas profesional yang berkelanjutan untuk menghadapi dinamika kesehatan mental remaja yang kian kompleks.

## **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Model Layanan Bimbingan dan Konseling untuk peningkatan kesehatan mental siswa

di SMPN 43 Bandung berada pada level yang sangat efektif. Keberhasilan ini secara fundamental didorong oleh dukungan sistem yang optimal yang memenuhi variabel utama dalam Model Edwards III. Ketersediaan *instrumental input* yang ideal, berupa kejelasan komunikasi kebijakan melalui mekanisme *In-House Training* (IHT) serta dukungan sumber daya fisik dan anggaran yang berkelanjutan, menjadi fondasi utama. Secara struktural, efisiensi layanan tercapai berkat otonomi penuh yang diberikan kepada tim BK serta kolaborasi aktif dengan Tim PAI dan TPPK juga Program Guru Wali. Pencapaian paling signifikan dalam studi ini adalah terciptanya *environmental input* yang kondusif, di mana stigma negatif terhadap layanan Bimbingan dan Konseling berhasil dihilangkan. Kondisi ini menumbuhkan kepercayaan diri siswa untuk mengakses bantuan psikologis secara proaktif dan nyaman. Implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini menegaskan bahwa komitmen penuh dari pimpinan sekolah, yang termanifestasi dalam realisasi anggaran dan penciptaan lingkungan tanpa stigma, merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan program kesehatan mental di institusi pendidikan.

#### **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan bagi pihak sekolah untuk mulai mengalihkan fokus dukungan dari aspek infrastruktur (*hardware*) menuju pengembangan kapasitas sumber daya manusia (*skillware*). Peningkatan kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling dalam teknik konseling klinis lanjutan, seperti *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) atau *Solution-Focused Brief Therapy* (SFBT), sangat diperlukan untuk menangani kompleksitas kasus

kesehatan mental remaja saat ini. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang dari model implementasi ini terhadap performa akademik siswa secara kuantitatif, atau melakukan studi komparatif di sekolah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda untuk menguji generalisasi model dukungan sistem ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fitriyana, N., Nurihsan, J., & Budiamin, A. (2021). Efektivitas layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan kesehatan mental siswa sekolah menengah pertama. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 5(1), 45-58.
- I-NAMHS. (2022). Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. *Psychiatry and Clinical Epidemiology*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mustofa, A., & Wahid, M. (2021). Hambatan birokrasi dan stigma layanan bimbingan konseling di sekolah: Sebuah studi kualitatif. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 8(2), 112-125.
- Silitonga, P. (2024). *Manajemen bimbingan dan konseling dalam menekan stres akademik siswa di era digital*. Jakarta: Pustaka Akademik.
- Syafar, M., & Wahab, A. (2020). Kolaborasi guru BK dan wali

- kelas dalam menjaga kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah. *Jurnal Edukasi Konseling*, 4(3), 201-215.
- World Health Organization (WHO). (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. Geneva: WHO Press.
- Wulan, R., & Yuni, S. (2023). Analisis ketersediaan sumber daya dan anggaran dalam implementasi kebijakan bimbingan konseling. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 11(1), 30-42.